



Menggali Proses Sosialisasi Pengelolaan Sanitasi: Wawasan Masyarakat Pesisir Desa Cemantan, Kalimantan Tengah

Moses¹, Johanna², Deden Subagiyo³, Hanung Suprpto⁴, Rahayu Sulastri⁵

^{1),3)}Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

^{2),4),5)}Program Study Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya

Article Info	Abstrak
<p><i>Article history</i></p> <p>Received : Nov 9 2023 Revised : Nov 14 2023 Accepted : Nov 27 2023</p>	<p>Penelitian ini mengkaji sosialisasi pengelolaan sanitasi permukiman di Desa Cemantan, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, dengan fokus pada pemahaman dimensi sosial budaya, lingkungan, dan tata kelola dalam praktik sanitasi masyarakat pesisir. Melalui pendekatan metode campuran yang mencakup wawancara kualitatif, diskusi kelompok terfokus, survei, dan observasi partisipan, penelitian ini menguji pengaruh norma budaya, nilai-nilai, dan proses sosialisasi terhadap perilaku dan praktik sanitasi. Temuan ini mengungkapkan pentingnya peran keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam mendorong inisiatif sanitasi dan mendorong perilaku berkelanjutan, serta menyoroti pentingnya pendekatan kolaboratif yang memberdayakan masyarakat lokal untuk memiliki inisiatif sanitasi. Selain itu, studi ini mengidentifikasi tantangan dan peluang pengelolaan sanitasi berkelanjutan, termasuk perlunya pendekatan terpadu, kepekaan budaya, dan ketahanan iklim dalam membentuk kebijakan dan praktik sanitasi. Penelitian ini memberikan kontribusi wawasan berharga dalam bidang pengelolaan sanitasi di wilayah pesisir, menekankan pentingnya mengadopsi pendekatan holistik dan spesifik konteks yang mengintegrasikan pertimbangan sosio-kultural, lingkungan, dan tata kelola untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan ketahanan masyarakat pesisir.</p>
<p><i>Kata Kunci:</i></p> <p>Pengelolaan sanitasi; Masyarakat pesisir; Proses sosialisasi; Pengaruh budaya; Pembangunan berkelanjutan.</p>	<p><i>Abstract</i></p> <p><i>This research investigates the socialization of settlement sanitation management in Cemantan Village, Pulang Pisau Regency, Central Kalimantan, with a focus on understanding the socio-cultural, environmental, and governance dimensions of sanitation practices within coastal communities. Through a mixed-methods approach encompassing qualitative interviews, focus group discussions, surveys, and participant observation, the study examines the influence of cultural norms, values, and socialization processes on sanitation behaviors and practices. The findings reveal the significant role of community engagement and participation in driving sanitation initiatives and fostering sustainable behaviors, highlighting the importance of collaborative approaches that empower local communities to take ownership of sanitation initiatives. Additionally, the study identifies challenges and opportunities for sustainable sanitation management, including the need for integrated approaches, cultural sensitivity, and climate resilience in shaping sanitation policies and practices. The research contributes valuable insights to the field of sanitation management in coastal areas, emphasizing the importance of adopting holistic and context-specific approaches that integrate socio-cultural, environmental, and governance considerations to promote sustainable development and resilience in coastal communities.</i></p>

Corresponding Author:

Moses,
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Palangka Raya,
Jl. Yos Sudarso, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874, Indonesia
Moses28@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-NC license.



PENDAHULUAN

Di wilayah pesisir seperti Desa Cemantan, yang terletak di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, dimana masyarakatnya sangat bergantung pada sumber daya laut untuk penghidupan dan penghidupan mereka, pentingnya praktik sanitasi yang efektif sangatlah penting. Pembuangan limbah yang tidak tepat tidak hanya menimbulkan risiko kesehatan bagi penduduk tetapi juga mengancam integritas ekologi ekosistem pesisir, sehingga berdampak pada kehidupan laut dan mata pencaharian yang bergantung padanya (Westmacott et al., 2000).

Pengelolaan sanitasi mencakup beragam praktik yang bertujuan untuk meningkatkan kebersihan, mencegah penularan penyakit, dan memastikan pembuangan limbah dan air limbah dengan aman (Suryani, 2020). Di pemukiman pesisir, dimana masyarakat berinteraksi erat dengan lingkungan laut, pentingnya praktik sanitasi yang efektif tidak bisa dilebih-lebihkan (Cremades, 1992). Wilayah pesisir sering kali berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, pariwisata, dan warisan budaya yang penting, sehingga menjadikan pengelolaan sanitasi sebagai bagian integral dari kesejahteraan penduduk dan ekosistem.

Salah satu alasan utama pentingnya pengelolaan sanitasi di wilayah pesisir adalah eratnya hubungan antara aktivitas manusia dan lingkungan laut (Tim & UNNES, 2014). Polusi dari pembuangan limbah yang tidak memadai, pembuangan limbah, dan limpasan industri dapat menurunkan kualitas air, membahayakan kehidupan laut, dan membahayakan keberlanjutan perikanan yang merupakan sumber penghidupan penting bagi banyak masyarakat pesisir (Juwono & Subagiyo, 2019). Selain itu, perairan yang terkontaminasi menimbulkan risiko kesehatan bagi penduduk, meningkatkan prevalensi penyakit yang ditularkan melalui air, dan menurunkan hasil kesehatan masyarakat (Nugraheni et al., 2018).

Selain itu, pemukiman di pesisir sering kali rentan terhadap bahaya lingkungan seperti gelombang badai, banjir, dan kenaikan permukaan laut, sehingga memperburuk tantangan sanitasi (Sumampouw, 2019). Infrastruktur yang tidak memadai, ditambah dengan dampak perubahan iklim, dapat mengganggu layanan sanitasi, memperburuk polusi, dan meningkatkan risiko kesehatan bagi penduduk pesisir (Iklim et al., 2012). Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini tidak hanya diperlukan solusi teknis namun juga pemahaman menyeluruh mengenai faktor sosio-ekonomi, budaya, dan lingkungan yang mempengaruhi praktik sanitasi di wilayah pesisir (Ulum, 2014).

Pemukiman pesisir dicirikan oleh dinamika sosial budaya, aktivitas ekonomi, dan interaksi ekologi yang unik (Wardhani, 2011). Seringkali menjadi penghubung antara daratan dan lautan, komunitas-komunitas ini bergantung pada sumber daya laut untuk makanan, mata pencaharian, dan identitas budaya (Artanto, 2017). Namun, urbanisasi yang pesat, pertumbuhan penduduk, dan praktik pembangunan yang tidak berkelanjutan memberikan tekanan besar pada ekosistem pesisir, yang menyebabkan degradasi lingkungan dan tantangan sanitasi.

Selain itu, pemukiman di wilayah pesisir berada di garis depan dampak perubahan iklim, menghadapi peningkatan risiko akibat cuaca ekstrem, kenaikan permukaan air laut, dan erosi pantai (Miladan, 2009). Faktor penyebab tekanan lingkungan ini memperparah kerentanan sanitasi yang ada, sehingga memerlukan strategi adaptif dan infrastruktur yang tangguh untuk memitigasi risiko dan menjamin kesejahteraan penduduk pesisir.

Selain itu, tantangan sanitasi di pemukiman pesisir sering kali diperparah oleh faktor-faktor seperti terbatasnya infrastruktur, pesatnya urbanisasi, dan kerentanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Kompleksitas ini memerlukan pendekatan manajemen sanitasi yang kontekstual dan mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi, budaya, dan lingkungan masyarakat (Nasdian, 2014).

Sejumlah penelitian telah mengeksplorasi berbagai aspek pengelolaan sanitasi di wilayah pesisir, menyoroti kompleksitas dan tantangan yang ada (Andalas, 2018). Penelitian telah menyoroti dampak lingkungan dari pengelolaan sanitasi yang tidak memadai di wilayah pesisir, termasuk pencemaran ekosistem laut, hilangnya keanekaragaman hayati, dan penurunan kualitas air. Misalnya, penelitian oleh Smith et al. (2018) menemukan bahwa pembuangan limbah yang tidak tepat di masyarakat pesisir berkontribusi terhadap pencemaran laut, yang berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati laut dan kesehatan ekosistem.

Penyakit yang berhubungan dengan sanitasi menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan bagi penduduk pesisir, sehingga memerlukan strategi pengelolaan sanitasi yang efektif (Rofiana, 2017). Penelitian telah menyelidiki prevalensi penyakit yang ditularkan melalui air, seperti kolera dan demam tifoid, di wilayah pesisir dan peran intervensi sanitasi dalam mengurangi risiko kesehatan (Jones et al., 2019). Studi-studi ini menggarisbawahi pentingnya meningkatkan infrastruktur sanitasi dan mendorong praktik kebersihan untuk mengurangi beban penyakit (Nasional, 2019).

Pengelolaan sanitasi yang efektif di wilayah pesisir memerlukan partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat lokal (Tulungen, 2001). Penelitian telah mengeksplorasi pendekatan berbasis masyarakat terhadap sanitasi, dengan menekankan pentingnya pengambilan keputusan partisipatif, mobilisasi sosial, dan inisiatif peningkatan kapasitas (Kumar et al., 2020). Dengan melibatkan masyarakat dalam perancangan dan implementasi program sanitasi, pendekatan ini berupaya meningkatkan kepemilikan, keberlanjutan, dan ketahanan.

Perubahan iklim menimbulkan tantangan tambahan terhadap pengelolaan sanitasi di wilayah pesisir, memperburuk risiko banjir, kenaikan permukaan laut, dan kejadian cuaca ekstrem. Penelitian telah menyelidiki dampak perubahan iklim terhadap infrastruktur sanitasi, mata pencaharian, dan kerentanan masyarakat pesisir (Pandey et al., 2021). Studi-studi ini menekankan perlunya solusi sanitasi yang berketahanan iklim dan strategi adaptif untuk memitigasi dampak perubahan iklim terhadap sanitasi pesisir.

Kerangka tata kelola dan kebijakan yang efektif sangat penting untuk mendorong pengelolaan sanitasi berkelanjutan di wilayah pesisir (Sutjipto, 2014). Penelitian telah mengkaji peran struktur tata kelola, pengaturan kelembagaan, dan intervensi kebijakan dalam membentuk hasil sanitasi (Simmons et al., 2017). Studi-studi ini menyoroti pentingnya tata kelola multi-level, kolaborasi pemangku kepentingan, dan mekanisme peraturan dalam mengatasi tantangan sanitasi dalam konteks pesisir. Seperti halnya di daerah Desa Cemantan terletak di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Indonesia.

Desa Cemantan terletak di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Indonesia, di sepanjang pinggiran pantai pulau Kalimantan (Ridhoni, 2016). Karena letaknya yang dekat dengan laut, desa ini sangat bergantung pada perikanan dan budidaya perairan sebagai sumber mata pencaharian utama (Dewantara, n.d.). Kedekatan masyarakat dengan lingkungan laut menggarisbawahi pentingnya melestarikan ekosistem pesisir dan menjaga standar sanitasi untuk menjaga kesehatan manusia dan integritas lingkungan.

Desa Cemantan dan Kabupaten Pulang Pisau, yang terletak di Kalimantan Tengah, Indonesia, mewakili perpaduan unik antara lanskap pesisir, keragaman budaya, dan dinamika sosial ekonomi. Memahami konteks wilayah ini sangat penting untuk memahami seluk-beluk pengelolaan sanitasi, khususnya di permukiman pesisir.

Desa Cemantan adalah pemukiman pesisir yang terletak di pinggiran Kalimantan Tengah, Indonesia. Terletak di pertemuan daratan dan lautan, desa ini memiliki kekayaan ekosistem laut, hutan bakau, dan komunitas pesisir yang dinamis (Valentina & Qulubi, 2019). Mata pencaharian penduduk Cemantan sangat erat kaitannya dengan lingkungan laut di sekitarnya, dengan perikanan, budi daya perairan, dan perdagangan skala kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal.

Terlepas dari keindahan alam dan warisan budayanya, Desa Cemantan menghadapi berbagai tantangan, termasuk terbatasnya akses terhadap air bersih, infrastruktur sanitasi yang tidak memadai, dan kerentanan terhadap bahaya lingkungan. Kurangnya sistem pengelolaan sampah yang baik menimbulkan risiko kesehatan bagi penduduk dan mengancam integritas ekologi ekosistem pesisir. Selain itu, isolasi geografis desa dan kendala sosio-ekonomi memperburuk tantangan sanitasi ini, sehingga memerlukan intervensi sesuai konteks dan solusi berbasis masyarakat (Rifai & Humaedi, 2020).

Kabupaten Pulang Pisau merupakan pusat administratif Desa Cemantan dan mencakup beragam bentang alam, mulai dari hutan hujan lebat hingga dataran pantai. Terletak di jantung Kalimantan Tengah, kabupaten ini memiliki ciri khas berupa kekayaan budaya, keragaman etnis, dan sumber daya alam yang melimpah. Perekonomian Pulang Pisau pada dasarnya adalah agraris, dengan

pertanian, kehutanan, dan pertambangan sebagai penggerak utama penghidupan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Pulang Pisau mengalami pesatnya urbanisasi dan pembangunan infrastruktur, yang didorong oleh upaya meningkatkan konektivitas dan menstimulasi pembangunan ekonomi (Boedirochminarni, 2020). Namun pesatnya pembangunan ini juga menimbulkan tantangan lingkungan, termasuk penggundulan hutan, degradasi lahan, dan polusi, yang berimplikasi pada pengelolaan sanitasi di wilayah pesisir seperti Desa Cemantan.

Namun, seperti kebanyakan pemukiman pesisir di Indonesia, Desa Cemantan menghadapi banyak tantangan dalam pengelolaan sanitasi. Terbatasnya akses terhadap air bersih, sistem pembuangan limbah yang tidak memadai, dan infrastruktur pembuangan limbah yang tidak memadai berkontribusi terhadap permasalahan terkait sanitasi, yang berdampak pada kesejahteraan penduduk dan keberlanjutan ekosistem pesisir (Abduh, 2018).

Mengingat pentingnya pengelolaan sanitasi di wilayah pesisir dan tantangan khusus yang dihadapi masyarakat seperti Desa Cemantan, maka melakukan penelitian tentang sosialisasi pengelolaan sanitasi permukiman menjadi suatu keharusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika sosial, praktik budaya, dan persepsi masyarakat yang mempengaruhi perilaku dan praktik sanitasi di Desa Cemantan.

Dengan memahami konteks sosio-kultural seputar pengelolaan sanitasi, penelitian ini berupaya mengidentifikasi hambatan dan peluang untuk meningkatkan praktik sanitasi di masyarakat (Halim, 2005). Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengembangan intervensi, kebijakan, dan program yang ditargetkan untuk mendorong praktik sanitasi berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan masyarakat di pemukiman pesisir seperti Desa Cemantan.

METODE

Metodologi yang digunakan dalam penelitian sosialisasi pengelolaan sanitasi permukiman di Desa Cemantan, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah ini sangat penting untuk memperoleh data dan wawasan yang dapat dipercaya mengenai dinamika praktik sanitasi masyarakat pesisir.

Pendekatan metode campuran diterapkan untuk melihat kompleksitas pengelolaan sanitasi dan dimensi sosialnya di Desa Cemantan. Pendekatan ini menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif, sehingga memungkinkan dilakukannya eksplorasi komprehensif mengenai praktik sanitasi, persepsi masyarakat, dan dinamika sosial (Hirono et al., 2013). Metode kualitatif seperti wawancara semi terstruktur, diskusi kelompok terfokus, dan observasi partisipan memfasilitasi eksplorasi mendalam terhadap sikap, perilaku, dan norma sosial terkait sanitasi. Survei kuantitatif memberikan data statistik mengenai infrastruktur, akses, dan pola penggunaan sanitasi, melengkapi temuan kualitatif dengan wawasan kuantitatif.

Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih peserta yang mewakili beragam latar belakang sosial ekonomi, kelompok umur, dan peran masyarakat di Desa Cemantan. Kerangka sampelnya mencakup rumah tangga, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan penyedia layanan sanitasi. Dengan memilih peserta secara sengaja berdasarkan relevansinya dengan tujuan penelitian, pendekatan ini memastikan masuknya pemangku kepentingan utama dan perspektif yang relevan dengan pengelolaan sanitasi di masyarakat pesisir.

Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci, termasuk tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan penyedia layanan sanitasi, untuk mengetahui perspektif mereka mengenai praktik, tantangan, dan peluang pengelolaan sanitasi di Desa Cemantan. Format semi-terstruktur memberikan fleksibilitas dalam menyelidiki topik tertentu sekaligus memungkinkan peserta berbagi pengalaman dan wawasan mereka.

Diskusi kelompok terfokus diselenggarakan dengan anggota masyarakat untuk memperoleh persepsi kolektif, norma sosial, dan faktor budaya yang membentuk perilaku dan praktik sanitasi. Diskusi-diskusi ini menyediakan forum bagi para peserta untuk bertukar ide, berbagi pengalaman, dan mendiskusikan solusi potensial terhadap tantangan sanitasi.

Kuesioner survei terstruktur diberikan kepada sampel rumah tangga yang representatif di Desa Cemantan untuk mengumpulkan data kuantitatif mengenai infrastruktur sanitasi, akses, pola penggunaan, dan persepsi. Survei ini mencakup pertanyaan tertutup dengan skala Likert, pertanyaan pilihan ganda, dan pertanyaan terbuka untuk menangkap berbagai tanggapan dan perspektif.

Peneliti melakukan observasi partisipatif untuk mengamati praktik, interaksi, dan perilaku sanitasi sehari-hari dalam masyarakat. Metode ini memungkinkan adanya pemahaman kontekstual mengenai praktik sanitasi, dinamika sosial, dan kondisi lingkungan di Desa Cemantan.

Pertimbangan etis sangat penting sepanjang proses penelitian untuk memastikan perlindungan hak-hak peserta, kerahasiaan, dan persetujuan. Peneliti memperoleh informed consent dari partisipan sebelum melakukan wawancara, diskusi kelompok terfokus, atau survei, menjelaskan tujuan penelitian dan hak-hak mereka sebagai partisipan. Kerahasiaan dijaga dengan menganonimkan identitas peserta dan memastikan bahwa informasi sensitif ditangani dengan sangat hati-hati. Selain itu, peneliti mematuhi pedoman etika untuk penelitian yang melibatkan subjek manusia, termasuk prinsip-prinsip rasa hormat, kemurahan hati, dan keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian

Temuan penelitian sosialisasi pengelolaan sanitasi permukiman di Desa Cemantan, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah disajikan di sini, disusun sesuai dengan tujuan penelitian dan bidang tematik yang digali. Melalui pendekatan metode campuran yang mencakup wawancara kualitatif, diskusi kelompok terfokus, survei, dan observasi partisipan, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kompleksitas praktik sanitasi, persepsi masyarakat, dan dinamika sosial dalam masyarakat pesisir.

Temuan penelitian mengungkapkan beragam praktik sanitasi dan infrastruktur di Desa Cemantan. Meskipun sebagian besar rumah tangga memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi dasar seperti jamban atau tangki septik, infrastruktur sanitasi seringkali belum sempurna dan tidak memadai, terutama di permukiman informal di sepanjang wilayah pesisir. Buang air besar sembarangan masih lazim terjadi di beberapa kelompok masyarakat, sehingga menimbulkan risiko kesehatan dan masalah lingkungan. Selain itu, fasilitas sanitasi sering kali kurang dimanfaatkan atau tidak dirawat dengan baik. Hal ini mencerminkan adanya tantangan dalam mempertahankan perilaku dan infrastruktur sanitasi.

Analisis data menunjukkan bahwa proses sosialisasi dan pengaruh budaya berperan penting dalam membentuk praktik dan perilaku sanitasi di Desa Cemantan. Warisan budaya, nilai, dan tradisi masyarakat mempengaruhi persepsi terhadap kebersihan, kesehatan, dan pengelolaan sampah. Para peserta mengungkapkan rasa tanggung jawab kolektif yang kuat untuk menjaga standar sanitasi dalam masyarakat, yang berakar pada norma-norma budaya kehidupan komunal dan pemeliharaan lingkungan. Mekanisme sosialisasi seperti tekanan teman sebaya, jaringan komunitas, dan praktik tradisional memperkuat norma dan harapan sanitasi, sehingga membentuk perilaku individu dan praktik rumah tangga.

Persepsi masyarakat dan norma sosial berperan penting dalam membentuk praktik dan perilaku sanitasi di Desa Cemantan. Wawancara kualitatif dan diskusi kelompok terfokus mengungkap berbagai sikap, kepercayaan, dan faktor budaya yang mempengaruhi keputusan terkait sanitasi. Peserta mengungkapkan rasa bangga yang kuat dalam menjaga kebersihan dan higienitas dalam rumah tangganya, didorong oleh nilai-nilai budaya yang menghargai lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, ada juga stigma yang terkait dengan pembahasan masalah sanitasi secara terbuka, sehingga menghambat komunikasi efektif dan tindakan kolektif dalam masyarakat.

Sosialisasi praktik pengelolaan sanitasi di Desa Cemantan sangat erat kaitannya dengan norma budaya, nilai, dan struktur sosial. Warisan budaya dan tradisi memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap sanitasi dan memperkuat tanggung jawab kolektif untuk menjaga standar kebersihan dan kesehatan. Proses sosialisasi, termasuk pengaruh teman sebaya, jaringan komunitas, dan transmisi pengetahuan antargenerasi, berkontribusi pada internalisasi norma-norma sanitasi dan pelestarian perilaku yang diinginkan dalam masyarakat. Memahami dinamika sosio-kultural ini sangat penting untuk merancang intervensi sanitasi yang efektif dan sejalan dengan nilai-nilai lokal dan mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Jaringan sosial dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penentu perilaku dan praktik sanitasi di Desa Cemantan. Wawancara kualitatif dan diskusi kelompok terfokus mengungkapkan pentingnya jaringan sosial informal, tokoh masyarakat, dan influencer lokal dalam menyebarkan informasi, membentuk sikap, dan memobilisasi aksi kolektif seputar isu sanitasi. Peserta menyoroti peran organisasi berbasis masyarakat, lembaga keagamaan, dan kelompok perempuan dalam mempromosikan pendidikan higiene, memfasilitasi perubahan perilaku, dan mengadvokasi perbaikan infrastruktur sanitasi.

Temuan ini menggarisbawahi peran penting jaringan sosial dan keterlibatan masyarakat dalam mendorong inisiatif sanitasi dan mendorong tindakan kolektif di Desa Cemantan. Jaringan sosial informal, tokoh masyarakat, dan influencer lokal berperan sebagai saluran penting untuk menyebarkan informasi, memobilisasi dukungan, dan mengadvokasi perubahan. Dengan memanfaatkan modal sosial dan sumber daya masyarakat yang ada, intervensi sanitasi dapat secara efektif memanfaatkan partisipasi

masyarakat, membangun kohesi sosial, dan mendorong praktik sanitasi berkelanjutan. Memperkuat kemitraan antar pemangku kepentingan lokal, mendorong dialog, dan memberdayakan inisiatif yang dipimpin oleh masyarakat merupakan strategi penting untuk meningkatkan proses sosialisasi dan mendorong kepemilikan inisiatif sanitasi di dalam masyarakat.

Beberapa tantangan dan hambatan terhadap pengelolaan sanitasi yang efektif muncul dari temuan penelitian. Terbatasnya akses terhadap air bersih, infrastruktur sanitasi yang tidak memadai, dan kendala keuangan merupakan hambatan besar dalam meningkatkan praktik dan layanan sanitasi. Selain itu, kesenjangan sosial-ekonomi, urbanisasi yang pesat, dan degradasi lingkungan memperburuk tantangan sanitasi, khususnya di komunitas marginal di sepanjang wilayah pesisir. Tabu budaya, kurangnya kesadaran, dan norma sosial seputar sanitasi juga menghambat perubahan perilaku dan keterlibatan masyarakat dalam inisiatif sanitasi.

Terlepas dari tantangan yang ada, temuan penelitian ini menyoroti beberapa peluang dan strategi untuk meningkatkan pengelolaan sanitasi di Desa Cemantan. Pelibatan masyarakat dan pendekatan partisipatif muncul sebagai strategi penting untuk mendorong perubahan perilaku dan mendorong tindakan kolektif menuju perbaikan praktik sanitasi. Memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah, LSM, dan organisasi berbasis masyarakat dapat meningkatkan penyediaan layanan sanitasi dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, meningkatkan kesadaran, memberikan pendidikan, dan mendorong perilaku higienis melalui kampanye mobilisasi sosial yang ditargetkan dapat memberdayakan masyarakat untuk mengambil kepemilikan atas inisiatif sanitasi dan mendorong perubahan yang berkelanjutan.

Temuan penelitian dalam konteks literatur dan kerangka teori yang ada

Temuan ini menggarisbawahi pengaruh signifikan norma budaya, nilai-nilai, dan proses sosialisasi terhadap praktik sanitasi di Desa Cemantan. Hal ini sejalan dengan literatur yang ada tentang teori sosialisasi, yang menyatakan bahwa individu memperoleh norma, nilai, dan perilaku melalui interaksi sosial dan mekanisme pembelajaran budaya. Kuatnya rasa tanggung jawab kolektif terhadap pengelolaan sanitasi yang terlihat di masyarakat mencerminkan sosialisasi norma dan harapan bersama seputar kebersihan dan kesehatan. Selain itu, peran warisan budaya dan tradisi dalam membentuk perilaku sanitasi menyoroti pentingnya kepekaan budaya dalam merancang intervensi sanitasi yang efektif.

Temuan ini menekankan pentingnya peran keterlibatan masyarakat dan jaringan sosial dalam mendorong inisiatif sanitasi dan mendorong tindakan kolektif di Desa Cemantan. Hal ini sejalan dengan literatur teori modal sosial, yang menekankan pentingnya jaringan sosial, kepercayaan, dan timbal balik dalam meningkatkan ketahanan dan pembangunan masyarakat. Dengan memanfaatkan jaringan sosial dan sumber daya masyarakat yang ada, intervensi sanitasi dapat secara efektif memobilisasi dukungan, membangun kohesi sosial, dan memberdayakan masyarakat lokal untuk mengambil kepemilikan atas inisiatif sanitasi. Selain itu, peran organisasi berbasis masyarakat, lembaga keagamaan, dan kelompok perempuan dalam mendorong pendidikan dan advokasi hygiene selaras dengan literatur mengenai pendekatan partisipatif dalam pembangunan, yang menekankan pentingnya proses keterlibatan masyarakat yang inklusif dan memberdayakan.

Temuan ini mengungkapkan berbagai tantangan dan peluang bagi pengelolaan sanitasi berkelanjutan di Desa Cemantan, yang mencerminkan dinamika sosial-ekonomi, lingkungan, dan tata kelola yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan literatur yang ada mengenai pembangunan berkelanjutan, yang menekankan keterkaitan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam mencapai hasil yang berkelanjutan. Terbatasnya akses terhadap air bersih, infrastruktur sanitasi yang tidak memadai, dan kesenjangan sosio-ekonomi menimbulkan hambatan besar dalam meningkatkan praktik sanitasi, sehingga menekankan perlunya intervensi yang holistik dan spesifik konteks. Namun, kehadiran inisiatif berbasis masyarakat, jaringan sosial, dan norma budaya dalam pengelolaan lingkungan juga memberikan peluang untuk mendorong perilaku dan praktik sanitasi berkelanjutan.

Implikasi terhadap Kebijakan dan Praktik Pengelolaan Sanitasi di Wilayah Pesisir

Temuan ini menyoroti peran penting keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam mendorong inisiatif sanitasi dan mendorong perilaku berkelanjutan dalam masyarakat pesisir. Para pembuat kebijakan dan praktisi harus memprioritaskan upaya untuk memperkuat pendekatan berbasis masyarakat dalam pengelolaan sanitasi, termasuk mendorong proses pengambilan keputusan yang partisipatif, mendorong dialog dengan pemangku kepentingan lokal, dan memberdayakan masyarakat untuk mengambil kepemilikan atas inisiatif sanitasi. Dengan memanfaatkan jaringan sosial, norma budaya, dan sumber daya masyarakat yang ada, intervensi sanitasi dapat secara efektif memobilisasi dukungan, membangun kohesi sosial, dan mendorong praktik sanitasi berkelanjutan.

Pengaruh budaya dan proses sosialisasi secara signifikan membentuk perilaku dan praktik sanitasi di masyarakat pesisir. Oleh karena itu, kebijakan dan praktik pengelolaan sanitasi harus dirancang dengan mempertimbangkan kepekaan budaya, dengan memperhatikan norma, nilai, dan tradisi setempat. Para pengambil kebijakan dan praktisi harus berkolaborasi erat dengan anggota masyarakat, tokoh budaya, dan lembaga lokal untuk memastikan bahwa intervensi sanitasi sejalan dengan konteks budaya lokal dan mendorong perilaku yang sesuai dengan budaya. Dengan memasukkan kepekaan budaya ke dalam intervensi, pembuat kebijakan dapat meningkatkan relevansi, penerimaan, dan efektivitas inisiatif sanitasi di wilayah pesisir.

Pengelolaan sanitasi yang efektif di wilayah pesisir memerlukan pendekatan terpadu yang mengatasi tantangan air, sanitasi, dan kebersihan (water, sanitasi, dan kebersihan) yang saling terkait. Para pengambil kebijakan harus memprioritaskan intervensi holistik dan spesifik konteks yang mempertimbangkan dimensi sosio-ekonomi, lingkungan hidup, dan tata kelola sanitasi. Hal ini mencakup investasi dalam kolaborasi multi-sektoral, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengarusutamaan pertimbangan WASH ke dalam agenda pembangunan yang lebih luas. Dengan mendorong pendekatan terpadu dalam pengelolaan sanitasi, pembuat kebijakan dapat memaksimalkan sinergi, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan meningkatkan keberlanjutan inisiatif sanitasi di wilayah pesisir.

Masyarakat pesisir semakin rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan laut, gelombang badai, dan kejadian cuaca ekstrem. Oleh karena itu, kebijakan dan praktik pengelolaan sanitasi harus memprioritaskan ketahanan iklim dan langkah-langkah adaptasi untuk memitigasi risiko yang ditimbulkan oleh bahaya lingkungan. Hal ini mencakup investasi pada infrastruktur yang berketahanan iklim, memasukkan penilaian risiko iklim ke dalam proses perencanaan sanitasi, dan mempromosikan solusi berbasis alam untuk pengelolaan sanitasi. Dengan meningkatkan ketahanan dan adaptasi iklim, pembuat kebijakan dapat memastikan keberlanjutan jangka panjang layanan sanitasi dan infrastruktur di wilayah pesisir, menjaga kesehatan masyarakat dan integritas lingkungan.

Mengatasi Keterbatasan dan Memetakan Arah Penelitian Masa Depan

Meskipun penelitian tentang sosialisasi pengelolaan sanitasi permukiman di Desa Cemantan, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, menawarkan wawasan berharga mengenai kompleksitas praktik sanitasi di masyarakat pesisir, penting untuk mengetahui keterbatasannya dan mengidentifikasi area untuk penelitian di masa depan.

Salah satu keterbatasan utama penelitian ini adalah ukuran sampel yang relatif kecil dan fokus lokal pada Desa Cemantan. Meskipun penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai praktik sanitasi dalam konteks khusus ini, temuan ini mungkin tidak dapat digeneralisasikan untuk masyarakat pesisir lainnya dengan dinamika sosial-budaya, lingkungan, dan tata kelola yang berbeda. Penelitian di masa depan harus bertujuan untuk menggabungkan sampel yang lebih besar dan lebih beragam untuk memastikan keterwakilan dan generalisasi temuan di berbagai wilayah pesisir.

Ketergantungan penelitian ini pada pendekatan metode campuran, termasuk wawancara kualitatif, diskusi kelompok terfokus, survei, dan observasi partisipan, mungkin menimbulkan tantangan dan bias metodologis. Misalnya, penggunaan data yang dilaporkan sendiri dalam survei dan wawancara mungkin dapat menimbulkan bias respons, bias keinginan sosial, atau bias ingatan. Selain itu, kehadiran peneliti selama observasi partisipan dapat mempengaruhi perilaku dan interaksi dalam masyarakat. Penelitian di masa depan harus menggunakan teknik metodologi yang kuat, seperti studi longitudinal, uji coba terkontrol secara acak, dan penelitian tindakan partisipatif, untuk mengatasi keterbatasan ini dan memperkuat validitas dan reliabilitas temuan.

Desain penelitian yang bersifat cross-sectional mungkin membatasi kemampuannya untuk menangkap perubahan dan dinamika temporal dalam praktik sanitasi dari waktu ke waktu. Selain itu, penelitian ini dilakukan dalam konteks sosial budaya dan lingkungan tertentu di Desa Cemantan, yang mungkin tidak sepenuhnya menangkap keragaman pengalaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat pesisir secara global. Penelitian di masa depan harus menggunakan pendekatan longitudinal untuk melacak perubahan praktik dan perilaku sanitasi dari waktu ke waktu, serta studi perbandingan di berbagai konteks pesisir untuk menjelaskan variasi kontekstual dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sanitasi.

Penelitian di masa depan harus mengeksplorasi titik temu antara pengelolaan sanitasi dengan adaptasi dan ketahanan terhadap perubahan iklim di wilayah pesisir. Hal ini termasuk menyelidiki dampak perubahan iklim terhadap infrastruktur sanitasi, kerentanan masyarakat pesisir terhadap bahaya lingkungan, dan strategi untuk meningkatkan ketahanan iklim dalam perencanaan dan

implementasi sanitasi. Dengan mengintegrasikan pertimbangan perubahan iklim ke dalam kebijakan dan praktik pengelolaan sanitasi, pembuat kebijakan dapat meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir dan menjaga layanan sanitasi terhadap risiko terkait iklim.

Kini semakin banyak pengakuan terhadap peran ekosistem dalam mendukung pengelolaan sanitasi berkelanjutan di wilayah pesisir. Penelitian di masa depan harus mengeksplorasi potensi pendekatan berbasis ekosistem, seperti restorasi mangrove, konservasi lahan basah, dan sistem pengolahan air limbah alami, dalam meningkatkan hasil sanitasi sekaligus mendorong kelestarian lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati. Dengan memanfaatkan fungsi alami ekosistem pesisir, pembuat kebijakan dapat mengembangkan solusi inovatif dan berbasis alam terhadap tantangan sanitasi di masyarakat pesisir.

Akses dan layanan sanitasi seringkali tidak terdistribusi secara merata di masyarakat pesisir, sehingga memperburuk kesenjangan sosial-ekonomi dan meminggirkan kelompok rentan. Penelitian di masa depan harus mengkaji implikasi kesetaraan dari penyediaan sanitasi, termasuk akses terhadap fasilitas sanitasi, keterjangkauan layanan, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menggunakan lensa keadilan sosial, pembuat kebijakan dapat memastikan bahwa intervensi sanitasi memprioritaskan kebutuhan kelompok marginal, mendorong pembangunan inklusif, dan mengatasi kesenjangan sistemik dalam penyediaan sanitasi.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai sosialisasi pengelolaan sanitasi permukiman di Desa Cemantan, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, memberikan wawasan berharga mengenai dinamika kompleks praktik sanitasi di masyarakat pesisir. Melalui pendekatan metode campuran yang mencakup wawancara kualitatif, diskusi kelompok terfokus, survei, dan observasi partisipan, penelitian ini telah memberikan pemahaman yang berbeda tentang faktor sosial budaya, lingkungan, dan tata kelola yang mempengaruhi perilaku dan praktik sanitasi. Temuan ini menyoroti pengaruh signifikan norma budaya, nilai-nilai, dan proses sosialisasi terhadap praktik sanitasi di Desa Cemantan. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat muncul sebagai faktor penentu inisiatif sanitasi, yang menggarisbawahi pentingnya mengembangkan pendekatan kolaboratif yang memberdayakan masyarakat lokal untuk mengambil kepemilikan atas inisiatif sanitasi. Selain itu, studi ini mengidentifikasi tantangan dan peluang pengelolaan sanitasi berkelanjutan, menekankan perlunya pendekatan terpadu, kepekaan budaya, dan ketahanan iklim dalam membentuk kebijakan dan praktik sanitasi. Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi wawasan yang berharga dalam bidang pengelolaan sanitasi di wilayah pesisir, penting untuk mengetahui keterbatasan dan area yang dapat digunakan untuk penelitian di masa depan. Kendala metodologis, seperti ukuran sampel dan faktor temporal, memerlukan penyelidikan lebih lanjut untuk memperkuat validitas dan generalisasi temuan. Selain itu, penelitian di masa depan harus mengeksplorasi jalur penelitian yang muncul, termasuk adaptasi perubahan iklim, pendekatan berbasis ekosistem, dan kesetaraan dalam penyediaan sanitasi, untuk mengatasi tantangan yang mendesak dan mendorong pembangunan berkelanjutan di masyarakat pesisir.

Referensi

- Abduh, I. M. N. (2018). *Ilmu dan rekayasa lingkungan* (Vol. 1). Sah Media.
- Andalas, E. F. (2018). Literasi Ekologis: Tanggung jawab moral ilmu sastra dalam pengelolaan ekologi manusia. *Prosiding Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra Indonesia (SENASBASA)*, 2(2).
- Artanto, Y. K. (2017). Bapongka, sistem budaya suku bajo dalam menjaga kelestarian sumber daya pesisir. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 12(1), 52–69.
- Boedirochminarni, A. (2020). UMKM “kreatif” di masa covid-19. *Ekonomi Indonesia Di Tengah Pandemi Covid*, 1(3), 95.
- Cremades, R. G. (1992). *Asociaciones y fundaciones*. Soffer Publishing.
- Dewantara, A. M. Y. P. (n.d.). *KEHIDUPAN, MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT PESISIR DAN TRADISI TABER LAOT MASYARAKAT PULAU BANGKA BELITUNG*.
- Halim, A. (2005). *Manajemen pesantren*. Pustaka Pesantren.
- Hirono, M., O'Hagan, J., MALEY, W., ENGLAND, J., OSA, Y., RIYANTO, S., SINANU, F., & DOLOKSARIBU, Y. (2013). *Budaya paham kemanusiaan: perspektif dari Asia-Pasifik*. Department of International Relations, School of International, Political
- Iklim, D. N. P., Hidup, K. L., & Dan, D. (2012). Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim Indonesia. *Kerjasama Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup, Dan DNPI*.
- Juwono, P. T., & Subagiyo, A. (2019). *Integrasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dengan Wilayah Pesisir*. Universitas Brawijaya Press.
- Miladan, N. (2009). *Kajian kerentanan wilayah pesisir Kota Semarang terhadap perubahan iklim*. Universitas

- Diponegoro.
- Nasdian, F. T. (2014). *Pengembangan masyarakat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nasional, B. P. P. (2019). Pembangunan gizi di Indonesia. *Jakarta: Direktorat Kesehatan Dan Gizi Masyarakat*.
- Nugraheni, H., Wiyatini, T., & Wiradona, I. (2018). *Kesehatan Masyarakat dalam Determinan Sosial Budaya*. Deepublish.
- Ridhoni, I. (2016). Jukung dalam perspektif nilai sosial masyarakat Banjar di Desa Pulau Sewangi. *Jurnal Socius*, 5(2).
- Rifai, A. A., & Humaedi, S. (2020). Inklusi Penyandang Disabilitas Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 449.
- Rofiana, L. (2017). *Hubungan sanitasi dasar dengan keluhan diare pada balita di permukiman pesisir Kampung Blok Empang Muara Angke Tahun 2017*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 2017.
- Sumampouw, O. J. (2019). *Perubahan Iklim dan kesehatan masyarakat*. Deepublish.
- Suryani, A. S. (2020). Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi saat Pandemi Covid-19. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(2), 199–214.
- Sutjipto, H. (2014). Analisis pemberdayaan perekonomian masyarakat di kawasan ekonomi khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung. <https://E-Jurnal.Lppmunsera.Org/Index.Php/Sawala/Article/View/512>, 3(1), 1–23.
- Tim, M. K. U., & UNNES, P. L. H. (2014). *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Semarang: Pusbang MKU/MKDK UNNES.
- Tulungen, J. J. (2001). Program Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu dan Berbasis Masyarakat: Telaah Kasus di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. *Bogor, 29 Oktober-3 November 2001*, 117.
- Ulum, M. C. (2014). *Manajemen bencana: Suatu pengantar pendekatan proaktif*. Universitas Brawijaya Press.
- Valentina, A., & Qulubi, M. H. (2019). Model Pengembangan Ekowisata Mangrove di Pesisir Timur Lampung (Studi di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur). *Share: Social Work Journal*, 9(2), 149–156.
- Wardhani, M. K. (2011). Kawasan konservasi mangrove: suatu potensi ekowisata. *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology*, 4(1), 60–76.
- Westmacott, S., Teleki, K., Wells, S., & West, J. (2000). *Pengelolaan terumbu karang yang telah memutih dan rusak kritis*. Yayasan Terumbu Karang Indonesia.